

IMPLEMENTASI KURIKULUM PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI SEKOLAH

Olivia Cherly Wuwung

Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Manado

ABSTRAK

Kondisi masyarakat yang plural, baik dari segi budaya, ras, agama, dan status sosial memungkinkan terjadinya benturan antarbudaya, antar ras, etnik, agama, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks seperti ini, pendidikan multikultur menjadi sangat penting dan menjadi sesuatu yang urgen bagi pendidikan nasional. Tulisan ini akan membahas tentang hal – hal berikut ini : (1) Konsep Pendidikan Multikultural, (2) Kedudukan pendidikan multikultur dalam sistem pendidikan nasional, cita-cita pendiri bangsa dan kaitannya dengan pendidikan multikultur (3) Implementasi Pendidikan Multikultural di sekolah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh guru didalam mengimplementasikan pendidikan multikultural di sekolah : (1) Guru telah memiliki sikap positif terhadap perbedaan dan keberagaman baik dari sisi gender, suku, ras, bahasa, budaya, dan lain-lain. (2) Mengaitkan perspektif budaya, gender, ras, dan lain-lain ketika mengajarkan suatu topik mata pelajaran tertentu. (4) Menjelaskan bagaimana suatu pengetahuan atau teori tercipta dengan mengaitkan pengaruh perspektif kondisi budaya, sosial, ekonomi, dan lain-lain ketika pengetahuan tersebut dibangun. (5) Meluruskan sikap negatif terhadap ras, gender, budaya, suku ketika terjadi pada diri siswa, sejawat ketika beraktifitas sehari-hari di sekolah (6) Memperlakukan semua siswa sama, adil, tanpa pandang bulu dalam proses pembelajaran maupun interaksi aktifitas sehari-hari di sekolah.

Kata Kunci : Kurikulum, Pendidikan Multikultural, Sekolah

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai suatu bangsa terdiri dari berbagai suku (sekitar 600 suku) dengan aneka ragam budaya satu sama lain yang tersebar di lebih dari 17000 pulau, disatukan sebagai suatu bangsa oleh suatu falsafah Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diperkuat dengan slogan, “Bhineka Tunggal Ika” sebagai lambing negara. Kita, juga secara umum adalah bagian dari masyarakat yang terdiri dari aneka ragam budaya yang berbeda beda satu sama lain. Namun, perbedaan tersebut bukanlah menjadi penghambat, tapi justru sebaliknya, pemahaman yang mendalam makna perbedaan sebagai keniscayaan yang akan membuat bumi ini aman, damai dan sejahtera.

Kondisi masyarakat yang plural, baik dari segi budaya, ras, agama, dan status sosial memungkinkan terjadinya benturan antarbudaya, antar ras, etnik, agama, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Konflik sosial yang bernuansa SARA (suku, agama, dan ras) yang melanda negeri ini pada dasawarsa terakhir berkaitan erat dengan masalah kebudayaan. Kekerasan yang terjadi di Cikeusik atau Temanggung beberapa waktu yang silam, misalnya, makin membuka mata kita bahwa sakralitas makna “Bhineka

Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa”, diakui atau tidak, sudah mulai luntur. Dan ini, jelas menjadi perkara serius yang perlu segera dituntaskan sebelum akhirnya mewabah menjadi “penyakit sosial” yang bisa meluluhlantakkan basis keindonesiaan kita yang sejak dulu amat toleran terhadap perbedaan. Apalagi, kasus-kasus yang mencuat ke permukaan terkait langsung dengan masalah keyakinan, kepercayaan, atau agama yang menjadi salah satu hak dasar dan asasi setiap warga bangsa. Ini artinya, tak seorang pun yang berhak untuk mencampuri dan mengintervensi hak-hak setiap warga negara yang mendasar dan asasi itu (Sawali: 2011).

Dalam konteks seperti ini, pendidikan multikultur menjadi sangat penting dan menjadi sesuatu yang urgen bagi pendidikan nasional. Tulisan ini akan membahas tentang hal – hal berikut ini : (1) Konsep Pendidikan Multikultural, (2) Kedudukan pendidikan multikultur dalam sistem pendidikan nasional, cita-cita pendiri bangsa dan kaitannya dengan pendidikan multikultur (3) Implementasi Pendidikan Multikultural di sekolah.

Konsep Pendidikan Multikultural

Menurut Banks dan Banks (2005) pendidikan multikultur adalah:

“Multicultural education is a field of study and an emerging discipline whose major aim is to create equal educational opportunities for students from diverse racial, ethnic, social-class, and cultural groups. One of its important goals is to help all students to acquire the knowledge, attitudes, and skills needed to function effectively in a pluralistic democratic society and to interact, negotiate, and communicate with peoples from diverse groups in order to create a civic and moral community that works for the common good.

Definisi di atas menjelaskan bahwa pendidikan multikultur merupakan bidang studi atau disiplin baru. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kesempatan pendidikan yang sama untuk semua siswa dari berbagai ragam ras, suku, kelas social dan kelompok budaya.

Salah satu tujuannya adalah untuk membantu semua siswa menguasai pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan (agar berfungsi secara efektif) dalam masyarakat demokrasi yang pluralistik dan agar dapat berinteraksi, bernegosiasi dan berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai kalangan untuk menciptakan komunitas warga dan komunitas moral yang bekerja untuk kebaikan. Lebih jauh, Banks (2001) seperti dikutip oleh Tilaar (2004) mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai konsep, ide atau falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman social, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan individu, kelompok maupun negara (Tilaar, 2004:181). Sementara Nieto (2002) seperti dikutip oleh Valenzuela (2010) mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai berikut:

"Multicultural education is a process of comprehensive school reform and basic education for all students. It challenges and rejects racism and other forms of discrimination in schools and society and accepts and affirms the pluralism (ethnic, racial, linguistic, religious, economic, and gender, among others) that students, their communities, and teachers represent. Multicultural education permeates the curriculum and instructional strategies used in schools, as well as the interactions among teachers, students, and parents, and the very way that schools conceptualize the nature of teaching and learning. Because it uses critical pedagogy as its underlying philosophy and focuses on knowledge, reflection, and action (praxis) as the basis for social change, multicultural education promotes the democratic principles of social justice."

Jadi, pendidikan multikultur merupakan reformasi sekolah yang komprehensif dan juga pendidikan dasar bagi semua siswa. Pendidikan multikultural menentang dan menolak rasisme dan segala bentuk diskriminasi di sekolah dan masyarakat. Pendidikan multikultur menerima dan menghargai pluralisme (etnik, ras, bahasa, agama, ekonomi, gender, dll) yang siswa, masyarakat dan guru wakili. Pendidikan multikultural merasuk masuk kedalam kurikulum dan strategi pembelajaran yang digunakan di sekolah, juga kedalam interaksi antar guru, siswa dan orang tua dan semua cara dimana sekolah mengkonseptualisasikan proses belajar mengajar. Karena pendidikan multikultur menerapkan pedagogi kritis, maka memfokuskan pada pengetahuan, refleksi, dan aksi (praksis) sebagai dasar perubahan social. Pendidikan multikultur mendorong prinsip demokrasi keadilan sosial. Neito (2002), seperti dikutip oleh de Valenzuela (2010) menjelaskan tujuh karakteristik pendidikan multikultur sebagai berikut:

- Pendidikan multikultur adalah pendidikan anti-rasis
- Pendidikan multikultur adalah pendidikan dasar
- Pendidikan multikultur adalah penting bagi semua siswa
- Pendidikan multikultur adalah luas
- Pendidikan multikultur adalah keadilan sosial
- Pendidikan multikultur adalah proses
- Pendidikan multikultur adalah pedagogi kritis

Pendidikan multikultur, secara lebih sederhana adalah seperti yang didefinisikan oleh Banks dan Banks (1997) seperti dikutip dalam situs resmi *Connecticut State Department of Education* yang mengatakan bahwa pendidikan multikultur dapat didefinisikan menurut tiga hal, yaitu ide atau konsep (*idea or concept*), gerakan reformasi (*reform movement*), dan proses berkelanjutan (*ongoing process*).⁵ Sebagai ide, pendidikan multikultur mengandung makna bahwa semua peserta didik, tanpa memperhatikan gender, status social, suku, rasa atau karakteristik budaya, wajib memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah.

Sebagai gerakan reformasi, pendidikan multikultur dirancang untuk membuat perubahan di sekolah dan institusi pendidikan sehingga seluruh peserta didik dari semua kelas sosial, gender, ras, dan kelompok budaya dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar.

Hal ini telah diamanatkan dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 :

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu.

Dengan demikian pendidikan nasional harus dilandasi dengan nilai – nilai pendidikan multikultur yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran di sekolah. Sebagai proses berkelanjutan, pendidikan multikultur adalah proses terus menerus diterapkan di segala aspek pendidikan di sekolah dengan tujuan persamaan hak memperoleh pendidikan dan meningkatkan prestasi akademik untuk mencapai potensi tertinggi dirinya sebagai manusia (*the highest potentials as human beings*) yang mungkin tidak pernah tercapai sempurna tapi tetap terus diupayakan. Hal ini pula sejalan dengan pendapat Jacques Delors,

The Commission does not see education as a miracle cure or a magic formula opening the door to a world in which all ideals will be attained, but as one of the principal means available to foster a deeper and more harmonious form of human development and thereby to reduce poverty, exclusion, ignorance, oppression and war. (Delors, 1998:13)

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah upaya jangka panjang yang harus dilakukan tanpa kenal lelah. Mencermati beberapa definisi di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendidikan multikultural adalah upaya membangun manusia menjadi manusia yang sebenarnya, manusia yang mengakui adanya perbedaan, persamaan hak dan keadilan sosial. Semua manusia memperoleh hak yang sama untuk menjadi manusia seutuhnya, karena itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan yang tertuang pada Hak dan Kewajiban Warga Negara UU. 20 Tahun 2003 Pasal 5 ayat 1.

“Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.

Pendidikan multikultural sebagai sebuah konsep muncul karena ada interes politik, sosial, ekonomi, dan intelektual yang mendorong. Wacana pendidikan multikultural pada awalnya muncul di Amerika karena punya akar sejarah dengan gerakan hak asasi manusia (HAM) dari berbagai kelompok yang tertindas di negeri tersebut. Banyak pendidikan multikultural yang merujuk pada gerakan sosial orang Amerika keturunan Afrika dan kelompok kulit berwarna lain yang mengalami praktik diskriminasi di lembaga-lembaga publik pada masa perjuangan hak asasi pada tahun 1960-an. Di antara lembaga yang secara khusus disorot karena bermusuhan dengan ide persamaan ras pada saat itu adalah lembaga pendidikan. Pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, suara-suara yang menuntut lembaga-lembaga pendidikan agar konsisten dalam menerima dan menghargai perbedaan semakin gencar dikumandangkan oleh para aktivis, para tokoh, dan orang tua. Mereka menuntut adanya persamaan kesempatan di bidang pekerjaan dan pendidikan. Momentum inilah yang dianggap sebagai awal mula dari konseptualisasi pendidikan multicultural (Sanusi, 2011).

Tahun 1980-an dianggap sebagai kemunculan lembaga sekolah yang berlandaskan pendidikan multikultural yang didirikan oleh para peneliti dan aktivis pendidikan progresif. James Bank adalah salah seorang pioner dari pendidikan multikultural. Dia yang membumikan konsep pendidikan multikultural menjadi ide persamaan pendidikan. Pada pertengahan dan akhir 1980-an, muncul kelompok sarjana di antaranya Carl Grant, Christine Sleeter, Geneva Gay dan Sonia Nieto yang memberikan wawasan lebih luas soal pendidikan multikultural, memperdalam kerangka kerja yang membumikan ide persamaan pendidikan dan menghubungkannya dengan transformasi dan perubahan sosial.

Didorong oleh tuntutan warga Amerika keturunan Afrika, Latin/Hispanic, warga pribumi dan kelompok marjinal lain terhadap persamaan kesempatan pendidikan serta didorong oleh usaha komunitas pendidikan profesional untuk memberikan solusi terhadap masalah pertentangan ras dan rendahnya prestasi kaum minoritas di sekolah menjadikan pendidikan multikultural sebagai slogan yang sangat populer pada tahun 1990-an. Selama dua dekade konsep pendidikan multikultural menjadi slogan yang sangat populer di sekolah-sekolah AS. Secara umum, konsep ini diterima sebagai strategi penting dalam mengembangkan toleransi dan sensitivitas terhadap sejarah dan budaya dari kelompok etnis yang beraneka macam di negara ini.

Ide pendidikan multikulturalisme akhirnya menjadi komitmen global sebagaimana direkomendasi UNESCO pada bulan Oktober 1994 di Jenewa. Rekomendasi itu di antaranya memuat empat pesan. Pertama, pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinnekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat dan budaya serta mengembangkan kemampuan untuk

berkomunikasi, berbagi dan bekerja sama dengan yang lain. Kedua, pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian yang memperkokoh perdamaian, persaudaraan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. Ketiga, pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai tanpa kekerasan. Karena itu, pendidikan hendaknya juga meningkatkan pengembangan kedamaian dalam pikiran peserta didik sehingga dengan demikian mereka mampu membangun secara lebih kokoh kualitas toleransi, kesabaran, kemauan untuk berbagi dan memelihara.

Konsep pendidikan multikultural dalam perjalanannya menyebar ke kawasan di luar Amerika Serikat, khususnya di negara-negara yang memiliki keragaman etnis, ras, agama, dan budaya. Sekarang, pendidikan multikultural secara umum mencakup ide pluralisme budaya. Tema umum yang dibahas meliputi pemahaman budaya, penghargaan budaya dari kelompok yang beragam dan persiapan untuk hidup dalam masyarakat pluralistik.

Kedudukan pendidikan multikultur dalam sistem pendidikan nasional, cita-cita pendiri bangsa dan kaitannya dengan pendidikan multikultur.

Jika kita kaji jauh ke belakang, melihat kembali perjalanan sejarah lahirnya Bangsa Indonesia dapatlah kita lihat bahwa semangat multikulturalismelah yang menjadikan Indonesia sebagai suatu bangsa. Semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” adalah wujud pengakuan adanya keberagaman (*pluralism*). Seperti terlihat dalam definisi yang dijelaskan di atas, bahwa pendidikan multikultur menentang adanya rasis dan ketidakadilan sosial. Pembukaan UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Secara eksplisit dalam alinea ke-4, yang juga merupakan bagian dasar dari Pancasila, tertulis semangat multikulturalisme, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab (sila kedua), dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ki Hajar Dewantara menekankan pendidikan multikultural dengan pernyataannya sebagai berikut:

“Oleh karena tiap-tiap negara itu terjadi dari beberapa golongan yang masing-masing mempunyai sifat dan kepercayaan sendiri-sendiri, haruslah kita memahami perbedaan-perbedaan golongan itu agar terwujudlah azas persatuan yang selaras (*harmonis*) dan menurut keadaan (*natuurlijk*)” (Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977:3)

Jelas, pada masa itu pemikiran Ki Hajar Dewantara telah menyatakan bahwa perbedaan dan keberadaan bangsa yang beragam baik dilihat dari sisi gender, suku, ras, budaya dan lain-lain adalah suatu kenyataan dan lebih jauh adalah suatu hukum alam (*natuurlijk*). Oleh karenanya paham akan perbedaan untuk persatuan dan keselarasan (perdamaian) antar bangsa perlu ditanamkan dalam proses pendidikan. Semangat

multikulturalisme juga terlihat dalam Tap MPR RI No VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, seperti dikutip oleh Tilaar (2004) yang meliputi. (Tilaar, 2004:204).

- Etika sosial budaya yang menekankan hidupnya nilai-nilai jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai dan saling menolong.
- Etika politik dan pemerintahan; yang menuntut sikap para pejabat dan elit politik yang jujur, amanah, sportif, melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati dan siap mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan.
- Etika ekonomi dan bisnis yang meliputi mencegah praktek monopoli, oligopoly, korupsi, kolusi, nepotisme, serta menumbuhkan persaingan sehat dan rasa keadilan di dalam berbisnis.
- Etika penegakan hukum yang berkeadilan; yang menuntut penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama terhadap setiap warga negara.
- Etika kelimuan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan perpihak pada kebenaran.
- Etika lingkungan yang menuntut penghargaan dan kesadaran untuk melestarikan lingkungan hidup serta penataan ruang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Pendidikan multikultural belum tercantum secara eksplisit. Rumusan yang mengacu pada pentingnya pendidikan multicultural masih bersifat umum (idealis) (Tilaar, 2004:209). Tujuan pendidikan multikultural tentunya sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dalam UU. No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional seperti terlihat dalam Pasal 3 yang berbunyi:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Sebagai kesimpulan untuk sub bahasan ini, dalam konteks multikulturalisme, bangsa ini dibangun atas semangat pengakuan dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas adanya kenyataan multikultur dengan tujuan yang sama membangun masyarakat yang mengakui dan menghargai perbedaan serta keadilan social (*social justice*). Dengan demikian, untuk membangun masyarakat yang mengakui dan menghargai perbedaan (dari berbagai aspek, baik budaya, suku, gender, ras, status sosial) diperlukan proses pendidikan yang bukan mengajarkan tentang multikultur tapi membangun sikap dan mental masyarakat. Seperti diungkapkan oleh Tilaar (2004:179) bahwa pluralisme budaya bukanlah sesuatu yang “*given*” tapi merupakan suatu proses internalisasi nilai-

nilai didalam suatu komunitas. Oleh karena itu pendidikan multikultural hendaknya merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai multikultur itu sendiri dalam institusi pendidikan.

Implementasi Pendidikan Multikultural di sekolah

Pendidikan formal atau lebih dikenal dengan sistem persekolahan, mempunyai peranan yang amat menentukan perkembangan potensi manusia secara maksimal, sehingga manusia itu memiliki ketajaman response terhadap lingkungannya, ketrampilan, intelektual, sehat dan berkehidupan yang baik, koperatif, mempunyai motivasi yang tinggi untuk berprestasi, mampu berkompetisi, toleran, dapat menghargai pendapat orang lain, dan mampu mencapai kebahagiaan hidup. Peranan persekolahan dalam pembentukan kepribadian manusia ini belum dapat digantikan oleh sistem yang lain (Sutjipto, 2005). Pandangan yang sama juga diutarakan bahwa sekolah adalah lembaga yang secara potensial paling strategis untuk mengembangkan segala kemampuan dan sikap yang diperlukan generasi muda untuk memasuki era lepas landas dan perkembangan selanjutnya di abad ke – 21. (Soedijarto, 1993)

Seperti yang diutarakan oleh Hilda Taba (1962) : *A cultural perspective on education and its institution make it possible also to think of education in school as a change agent.*

Adalah sangat penting di dalam proses membangun budaya multikultural dalam sistem persekolahan ini untuk memperhatikan apa yang dikemukakan oleh Komisi Dunia untuk Kebudayaan dan Pembangunan UNESCO (1998):

A truly multicultural education will be one that can address simultaneously the requirements of global and national integration, and the specific needs of particular culturally distinct communities, both in rural and urban settings. (Delors, 1998:67)

Dalam era otonomi daerah, sistem persekolahan mempunyai otonomi yang lebih besar. Pendidikan yang bermuatan multikultural tidak mungkin dapat dicapai dengan kurikulum yang mengandalkan kompetensi yang dapat diukur semata-mata dan didasarkan atas standar nasional yang kaku, lebih-lebih dengan sistem yang sentralistik. Sekolah harus berfungsi sebagai lembaga pembudayaan, dalam pengertian menjadi lembaga yang dapat menyediakan kesempatan dan fasilitas untuk terjadinya proses pembudayaan yang dinamik. Ini memerlukan perubahan paradigma (*paradigm shift*) bagi para guru dan terutama pengambil kebijaksanaan pendidikan. Pendidikan multikultural bertujuan memperluas bukan hanya toleransi terhadap budaya yang berbeda, tetapi lebih jauh dari itu adalah mengembangkan mutual respect yaitu menanamkan kesadaran kepada murid akan keragaman (*plurality*), kesetaraan (*equality*), kemanusiaan (*humanity*), keadilan (*justice*) dan nilai-nilai demokrasi (*democraton values*) yang

diperlukan dalam beragam aktivitas sosial. Demikian pula telah diungkapkan oleh Mc. Neil (1996:350) :

Cultural pluralism now embraces many aims. Among them are the mutual appreciation and understanding of various cultures in the society; cooperation among the diverse group in the society; institutions; coexistence of different lifestyles, language religious belief, and family structure; and freedom for each subculture to work out its social future.

Membangun masyarakat demokratis atau pendidikan multikultural, yang dapat menghasilkan orang-orang (warga negara) yang menyadari, mengakui dan menghargai perbedaan (pluralism) bukan merupakan hal yang mudah. Perlu dirancang atau didesain sedemikian rupa secara sistemik. Pada dasarnya, menurut Gorsky (2010) untuk dapat menerapkan pendidikan multikultur di sekolah diperlukan upaya transformasi pada tiga level yaitu transformasi level diri (*transformation of self*), transformasi level sekolah (*transformation of school and schooling*) dan transformasi level masyarakat (*transformation of society*) (Groski, 2001). Transformasi pada level diri dapat digambarkan dengan menjawab pertanyaan, “apakah semangat multikulturalisme telah ada atau terjadi pada diri saya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah?” Dengan kata lain, bagaimana kita dapat melakukan pendidikan multikultur kalau sikap positif kita terhadap perbedaan dan keberagaman belum terjadi. Nampaknya, transformasi level diri ini merupakan salah satu kunci penentu keberhasilan pendidikan multikultur. Untuk transformasi level sekolah, Banks dan Banks memberikan panduan dimana ada lima dimensi pendidikan multikultur yang seharusnya secara simultan dilakukan, yaitu integrasi materi (*content integration*), proses pembentukan pengetahuan (*knowledge construction process*), reduksi prasangka (*prejudice reduction*), pendidikan/perlakuan pedagogic tanpa pandang bulu (*equity pedagogy*), dan pemberdayaan budaya sekolah dan struktur social (*empowering school culture and social structure*) (Banks, 1997).

Integrasi konten adalah upaya guru memberikan atau menggunakan contoh dan materi dari berbagai budaya dan kelompok untuk mengajarkan konsep kunci, prinsip, generalisasi, teori dan lain-lain ketika mengajar satu topik atau mata pelajaran tertentu. Sebagai contoh, ketika mengajar topik tumbuhan berbiji belah (dikotil), guru menyinggung bahwa kopi adalah salah satu contoh dikotil, kemudian dikaitkan dengan bagaimana masyarakat Lampung, masyarakat Aceh, masyarakat Jawa memanfaatkan kopi sebagai minuman dalam tradisi masing-masing. Artinya, yang dimaksud dengan integrasi konten adalah mengintegrasikan pendidikan multikultur ke dalam mata pelajaran/topik pelajaran. Dengan kata lain, sambil belajar biologi, terjadi kesadaran akan perbedaan budaya. Proses pembentukan pengetahuan adalah upaya membantu siswa untuk memahami, mencari tahu, dan menentukan bagaimana suatu pengetahuan atau teori pada dasarnya secara implisit tercipta karena adanya pengaruh budaya tertentu, kalangan tertentu, kelompok dengan status sosial tertentu yang terjadi pada

saat itu. Sebagai contoh, Galileo menghasilkan teori heliosentris yang menumbangkan asumsi geosentris yang terjadi pada masa dimana pengaruh agama saat itu sangat dominan. Sehingga, Galileo harus dihukum mati karena teorinya, namun belakangan teori tersebut dipakai oleh masyarakat dunia. Reduksi prasangka adalah upaya guru membantu siswa mengembangkan sikap positif terhadap perbedaan (baik dari sisi suku, budaya, ras, gender, status sosial, dll.) Sebagai contoh, adalah tidak benar kalau guru mendorong sikap atau prasangka yang menganggap bahwa orang Papua yang berkulit hitam adalah terbelakang, bodoh dan lain-lain. Prasangka-prasangka yang tidak benar terhadap gender, ras, budaya dan lain-lain dalam proses interaksi di sekolah inilah yang harus dihindari. Setidaknya guru berkewajiban meluruskan asumsi dan prasangka tersebut. Salah satu cara mengurangi prasangka ini adalah dengan melibatkan siswa melakukan aktifitas bersama dengan mereka yang terdiri dari berbagai status sosial, ras, gender dan lain-lain.

Perlakuan pedagogik tanpa pandang bulu (*equity pedagogy*) adalah upaya guru memperlakukan secara sama tanpa pandang bulu dalam proses pembelajaran di kelas. Hal ini akan terlihat dari metode yang digunakan, cara bertanya, penunjukkan siswa, pengelompokan siswa. Contoh *inequity pedagogy* adalah guru senantiasa menunjuk seorang siswa sebagai ketua kelompok, karena siswa tersebut anak dari kalangan status sosial tertentu yang lebih tinggi dari yang lain. Pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial proses merstrukturisasi dan reorganisasi sekolah sehingga siswa dari beragam ras, suku, kelas sosial akan mengalami dan merasakan pemberdayaan dan persamaan budaya. Dengan demikian, semangat multikulturalisme harus tercermin dalam segala aktivitas sekolah. Hal ini menuntut adanya perubahan baik dari sisi literasi multikultur pendidik dan tenaga kependidikan, kebijakan sekolah, struktur organisasi, iklim sekolah dan lain-lain.

Transformasi level masyarakat merupakan upaya yang paling berat dan karena sangat kompleks dan melibatkan berbagai unsur terkait. Namun, sebenarnya transformasi level masyarakat akan terjadi dengan sendirinya jika transformasi level diri dan level sekolah berjalan dengan baik.

Dibawah ini adalah lima pendekatan pendidikan multikultural yang berbeda yang dapat diaplikasikan dalam kurikulum multikultural yang di integralkan dengan mata pelajaran di sekolah yang dikutip dari *Christine E. Sleeter and Carl A Grant, "An analysis of Multicultural Education in the United State, " Harvard educational Review 57, no. 4 (November 1987) : 421 – 444)*

1. *Teaching the cultural different,*
2. *Human Relations*
3. *Ethnic Studies*
4. *Cultural diversity*
5. *Social reconstructionist*

Pendidikan multikultur dalam aplikasi konkretnya pada pembelajaran disekolah sebaiknya tidak hanya dikhususkan menjadi satu mata pelajaran atau menjadi tanggung jawab guru mata pelajaran tertentu saja akan tetapi perlu diimplementasikan secara integral ke dalam berbagai materi pembelajaran yang relevan dengan mata pelajaran yang bersangkutan. Untuk itu sebagai seorang tenaga pendidik selayaknya guru melakukan berbagai cara untuk dapat mewujudkan sekolah sebagai agen perubahan yang tidak hanya mentransfer ilmu tapi juga mentransformasi ilmu pengetahuan. Berbagai cara dapat dilakukan dengan pendekatan dan model-model pembelajaran yang menarik, peserta didik perlu diajak berdiskusi, bersimulasi, dan berdialog bagaimana cara hidup saling menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat plural. Sekolah perlu di-setting dan didesain sebagai wadah simulasi terhadap berbagai fenomena hidup dan kehidupan Indonesia yang serba-plural.

Tidak ada salahnya, peserta didik diajak berdialog dan belajar menumbuhkan kepekaannya terhadap kasus kekerasan yang terjadi. Bagaimana respon dan sikap peserta didik terhadap aksi-aksi kekerasan yang terjadi bisa dijadikan sebagai masukan berharga dalam proses pembelajaran berbasis pendidikan multikultural. Guru perlu memberikan kebebasan kepada subjek didik untuk merespon dan menyikapinya, sehingga mereka merasa dihargai dan diperlakukan sebagai sosok yang amat dibutuhkan kehadirannya dalam proses pembelajaran.

Guru dalam fungsinya sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran perlu memberikan penguatan agar pengalaman belajar yang mereka peroleh bisa dikonstruksi menjadi pengetahuan baru tentang nilai-nilai multikultural itu. Jika dikemas dalam proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, bukan mustahil kelak mereka akan menjadi generasi yang “sadar budaya” sehingga mampu menyandingkan keberagaman sebagai kekayaan budaya bangsa yang perlu dihormati dengan sikap toleran, tulus, dan jujur.

KESIMPULAN

Sekolah adalah lembaga yang secara potensial paling strategis untuk mengembangkan segala kemampuan dan sikap yang diperlukan generasi muda untuk memasuki era lepas landas dan perkembangan selanjutnya di abad ke – 21 yang juga sebagai agen perubahan diberi kepercayaan untuk memegang peranan strategis dalam melaksanakan misinya, keberhasilannya akan bergantung kepada kemampuan tenaga guru sebagai tenaga profesional, yang bukan hanya mampu menyajikan bahan pelajaran, melainkan mampu merencanakan dan mengelola proses belajar – mengajar yang kondusif bagi dapat berkembangnya potensi peserta didik untuk menjadi pribadi

yang dicita-citakan pada tujuan pendidikan nasional. Tugas untuk merencanakan dan mengelola proses belajar-mengajar yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya karakteristik peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, secara kurikuler berarti bahwa segala bahan ajaran perlu direncanakan dan diprogram bagi dapat terlaksananya proses belajar mengajar yang secara epistemologis, psikologis, dan sosial relevan dengan tujuan pendidikan nasional.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh guru didalam mengimplementasikan pendidikan multikultural di sekolah :

1. Guru telah memiliki sikap positif terhadap perbedaan dan keberagaman baik dari sisi gender, suku, ras, bahasa, budaya, dan lain-lain.
2. Mengaitkan perspektif budaya, gender, ras, dan lain-lain ketika mengajarkan suatu topik mata pelajaran tertentu.
3. Menjelaskan bagaimana suatu pengetahuan atau teori tercipta dengan mengaitkan pengaruh perspektif kondisi budaya, sosial, ekonomi, dan lain-lain ketika pengetahuan tersebut dibangun.
4. Meluruskan sikap negatif terhadap ras, gender, budaya, suku ketika terjadi pada diri siswa, sejawat ketika beraktifitas sehari-hari di sekolah
5. Memperlakukan semua siswa sama, adil, tanpa pandang bulu dalam proses pembelajaran maupun interaksi aktifitas sehari-hari di sekolah.

Sebagai wahana pengembangan, kurikulum memang penting, tetapi perlu diingat bahwa hal itu hanya merupakan sebagian dari upaya menciptakan pendidikan yang bermuatan multikultural. Orangtua, kepala sekolah, guru, bangunan fisik sekolah, proses belajar mengajar, perlakuan terhadap murid, kesempatan terlibat dalam kegiatan kelompok, belajar melakukan perbandingan dari berbagai macam kultur dalam bentuk *shared learning* adalah contoh beberapa perangkat untuk menciptakan pendidikan yang bermuatan multikultural. Pendidikan multikultural berarti juga pengembangan kreativitas yang merupakan faktor yang sangat penting dalam pendidikan. Orang tidak akan kreatif dalam situasi yang kaku, dan penuh komando, tetapi akan berkembang jika mereka merasa aman. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan untuk berinteraksi sebagai bagian dari *group learning* untuk membangun kultur. Pendidikan multikultural memerlukan proses belajar dan sosialisasi yang terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Banks, James A. and Cherry A. McGee Banks. (1997). *Multicultural Education Issues and Perspectives*. 3rd ed.
- Christine E. Sleeter and Carl A. Grant, *An analysis of Multicultural Education in the United State*, " *Harvard educational Review* 57. dalam Mc.Neil. John (1996) . *Curicullum : A comprehensive introduction*. Harper Collin College Publishers.
- Delors, Jacques. (1998). *Learning: The Treasure Within*. Unesco Publishing.
- Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa (1977), "Karya Ki Hajar Dewantara: Bagian 1 dan 2 (Cetakan Kedua)".
- Mc.Neil. John (1996) . *Curicullum : A Comprehensive Introduction*. Harper Collin College Publishers.
- Soedijarto (1993). *Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional*. PT. Grasindo. Jakarta.
- Sutjipto, *Konsep Pendidikan Formal dengan Muatan Budaya Multikultural*. Jurnal Pendidikan Penabur - No.04/ Th.IV/ Juli 2005
- Taba, Hilda. (1962). *Curriculum Development*. Harcourt, Brace & World. Inc. San Francisco.
- Tilaar, HAR (2004), *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Grasindo. Jakarta.
- UU. No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Cherry A. McGee Banks and James A. Banks, *Equity Pedagogy: An Essential Component of Multicultural Education*, yang ditulis oleh Lawrence Erlbaum Associates (Taylor & Francis Group) dalam <http://www.jstor.org/stable/1476634>
- de Valenzuela, Julia Scherba (2010) mengutip Nieto, S. (1996). *Affirming diversity: The sociopolitical context of multicultural education* (2nd ed.). New York: Longman. Diakses dari <http://www.unm.edu/~devalenz/handouts/nieto2.html>
- Needham Heights, MA: Allyn and Bacon. pp. 3-4. Dikutip oleh Connecticut State Department of Education dalam situs resmi <http://www.sde.ct.gov/sde/cwp/view.asp?a=2681&q=320458> .
- Paul C. Gorski (2010), "the Challenge of Defining Multicultural Education" dalam <http://www.edchange.org/multicultural/initial.html>
- Sanusi, Effendi. (2009) *Pendidikan Multikultural dan Implikasinya* <http://blog.unila.ac.id/effendisanusi>.
- Sawali, 2011. *Implementasi Pendidikan Multikultural di Sekolah*, <http://www.ispi.or.id/2011/03/10/implementasi-pendidikan-multikultural-di-sekolah/>